

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan sering dijadikan informasi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban manajer dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan pemilik kepadanya. Salah satu pusat perhatian bagi para pengguna laporan keuangan adalah komponen laba. Informasi laba seharusnya menggambarkan keadaan dan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, tetapi dalam kenyataannya pihak manajer sering melakukan rekayasa demi memuaskan kepentingan pribadinya.

Manajemen laba (*earning management*) merupakan pendekatan dari teori keagenan (*agency theory*). Dalam teori keagenan terdapat dua poros yang memiliki perbedaan kepentingan yaitu pihak pemilik (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). Disatu sisi pemilik perusahaan atau pemegang saham ingin manajemen dapat menjamin kepentingan mereka dengan adanya peningkatan laba sebagai indikasi adanya pengembalian modal yang telah ditanamkan. Di sisi lain manajemen ingin penilaian kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan perolehan laba yang terus meningkat sehingga dapat meningkatkan insentif mereka. Situasi seperti ini yang menjadi penyebab benturan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang biasa disebut *agency problem*.

Dengan adanya kesenjangan informasi, manajer akan semakin mudah melakukan manajemen laba. Manajer hanya akan mengungkapkan suatu informasi tertentu jika terdapat manfaat yang dapat diperolehnya. Namun jika informasi tersebut tidak memiliki manfaat bagi manajer maka informasi tersebut akan disembunyikan dan tidak diungkapkan atau bahkan mengubah informasi tersebut. Manajemen laba dilakukan untuk kepentingan manajer pada khususnya dan perusahaan pada umumnya.

Ada perbedaan pandangan antara praktisi dan akademisi terhadap manajemen laba. Para praktisi beragumen bahwa pada dasarnya manajemen laba sebagai suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan karena secara signifikan mempengaruhi laba perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh *stakeholder*. Apalagi jika aktivitas rekayasa manajerial ini dilakukan untuk menyesatkan dan merugikan pihak lain. Sementara para akademisi, termasuk peneliti beragumen bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan dampak dari kebebasan seorang manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan (Sulistyanto, 2008:4). Manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan sejauh apa yang dilakukannya masih dalam ruang lingkup prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini sesuai dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa manajemen laba berada di daerah abu-abu (*grey area*) antara aktivitas yang diijinkan prinsip akuntansi dan kecurangan.

Kasus manajemen laba di Indonesia yang terjadi pada 2002 adalah kasus PT Kimia Farma yang merupakan produsen obat-obatan milik pemerintah. Pada audit

tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar, dan laporan tersebut telah diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustafa (HTM). Akan tetapi, Bapepam menyebutkan terdapat kesalahan penyajian dan dampak kesalahan penyajian tersebut mengakibatkan *overstated* pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp32,688 miliar (Sumber : davidparsaon.wordpress.com).

Beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi atau praktik manajemen laba secara illegal yang terjadi di pasar modal negara lain, seperti pada Enron, Worldcom, dan Xerox. Kasus ini menyebabkan publik Amerika Serikat meragukan integritas dan kredibilitas para pelaku dunia usaha. Xerox Corporation yang terbukti melakukan manipulasi pembukuan dan pendapatan (*revenue*) perusahaan sebesar USD 6 miliar. Jumlah tersebut tidak sama dengan taksiran *Securities and Exchange Commission* (SEC) yang saat itu nilainya dari 1997 sampai 2000 menurut pengawas pasar modal AS diperkirakan hanya sebesar 3 miliar (Pratiwi, 2009).

Manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer salah satunya disebabkan oleh faktor pajak. Kasus pajak yang dilakukan oleh Grup Bakrie adalah kasus PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batubara milik Grup Bakrie selain PT Bumi Resources Tbk dan PT Arutmin Indonesia yang diduga terkait tindak pidana pajak di tahun 2007. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Ditjen Pajak, KPC diduga memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada 2007 untuk meminimalkan

pajak (Sumber: www.ortax.org). Kasus ini merupakan salah satu contoh praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh faktor pajak dengan melakukan rekayasa penjualan untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas merupakan fenomena tersendiri bagi dunia bisnis karena menunjukkan bagaimana manajemen laba dapat dijadikan cara untuk menipu investor, petugas pajak, pemilik perusahaan, kreditor dan pihak lainnya. Para akuntan publik, auditor internal perusahaan dan aparat penegak hukum sering tidak mampu untuk mendeteksi teknik-teknik *creative accounting* (permainan angka-angka dalam laporan keuangan) ini.

Di Indonesia perusahaan membuat laporan keuangan dengan berpedoman pada PSAK dan Peraturan Perpajakan. Manajemen membutuhkan penilaian dan perkiraan dalam menyiapkan laporan keuangan serta diberikan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan perusahaannya. Dengan adanya fleksibilitas dalam PSAK memungkinkan diskresi (pertimbangan manajemen) dalam akuntansi akrual. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan *accrual (accrual basis)*. Penggunaan *discretionary accrual* dimaksudkan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, tetapi pada kenyataannya *discretionary accrual* ini disalahgunakan oleh pihak manajer sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka menaikkan atau menurunkan laba.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan PSAK No. 46 yang mengatur akuntansi pajak penghasilan (PPh) yang mulai diterapkan sejak

2001. Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46 tersebut, perusahaan hanya menghitung besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan (Budiman, 2013).

Pajak tangguhan (*deffered tax*) adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang (Pindiharti, 2011). Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Laba akuntansi digunakan dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal sedangkan laba fiskal digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal yaitu standar akuntansi lebih memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam prinsip akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan.

Dampak pajak penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik dalam neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tetapi sebenarnya memiliki hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang atau sebaliknya. Bila dampak pajak di masa mendatang tersebut tidak disajikan di dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunaannya sehingga diperlukan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan. Aktivitas manajemen laba dengan motivasi pajak dapat terdeteksi dengan *book-tax differences*, yaitu dilakukan dengan cara menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih (yaitu kewajiban pajak tangguhan dikurangi aktiva pajak

tangguhan bersih), dan mengakibatkan naiknya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*).

Manajemen laba dapat dideteksi melalui alat pajak diantaranya adalah beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan dijadikan sebagai fasilitas oleh manajer untuk mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Scott (2000) mengemukakan bahwa berbagai metode akuntansi digunakan pihak manajemen dalam rangka penghematan pajak. Manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak semaksimal mungkin. Satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para pengguna eksternal. Namun di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Ettredge *et al.*, 2008).

Phillips *et al.* (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan non finansial yang tercatat di *New York Stock Exchange* tahun 1994-2000 dengan tujuan menghindari kerugian dan penurunan laba. Yin dan Cheng (2004) menguji pengaruh dari insentif pajak dan *non-pajak* terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi perubahan tarif pajak di Amerika Serikat. Hasil penelitian Yin dan Cheng mengemukakan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) lebih tertarik untuk mengurangi *discretionary accrual* demi mendapatkan keuntungan pajak. Di Indonesia Ulfah (2013) meneliti tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan

perencanaan pajak terhadap manajemen laba, penelitian tersebut menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Sedangkan Widyarningsih dan Purnamawati (2012) mengatakan beban pajak tangguhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini mengindikasikan semakin besar beban pajak tangguhan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Berbeda dengan Rahmi (2013) yang mengatakan beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendeteksi manajemen laba saat *seasoned equity offerings*.

Keberadaan faktor *non-pajak* juga mengindikasikan terjadinya manajemen laba, salah satunya yaitu kebijakan deviden. Pemegang saham akan melakukan investasi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Faktor utama yang selalu menjadi pertimbangan pemegang saham adalah tingkat pengembalian deviden yang akan diterima. Kebijakan deviden logis dikatakan sebagai manajemen laba, karena kebijakan deviden ditentukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) dan bukan merupakan keputusan dari manajemen. Dengan demikian, kebijakan deviden menjadi sumber konflik antara manajemen dan pemegang saham. Pemegang saham ingin deviden yang dibagikan tinggi sedangkan manajer lebih menyukai laba ditahan. Oleh karena itu kebijakan deviden cenderung memotivasi manajer dalam melakukan laba dengan pola menurunkan laba agar deviden yang dibagikan kecil (laba ditahan). Manajemen

selalu berusaha agar dana yang dimiliki oleh perusahaan sedapat mungkin memberikan manfaat pada perusahaan (bukan kepada pemegang saham).

Achmad (2007) menyatakan bahwa motivasi rencana bonus, perjanjian utang, dan biaya politik merupakan motivasi manajemen laba yang berlaku umum (bernilai global) dalam praktik-praktik bisnis pengelolaan perusahaan. Dalam penelitiannya, hasil investigasi terhadap perusahaan yang dijadikan sampel dalam investigasi menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terdiksi melakukan manajemen laba dengan motivasi: (1) pembayaran pajak, (2) pergeseran kinerja (sebagai akibat biaya politik), (3) laba dari restrukturisasi utang, (4) kesinambungan usaha, (5) motivasi rencana bonus, (6) pembayaran deviden, dan (7) *debt covenant*.

Hasil penelitian Achmad (2007) dan Putri (2012) mengemukakan bahwa kebijakan deviden berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kebijakan deviden sebagai sumber konflik antara manajemen dan pemegang saham dapat mempengaruhi atau memotivasi manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Kebijakan deviden sebagai salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba. Semakin tinggi *dividend payout ratio (DPR)* yang merupakan proksi dari kebijakan deviden, dapat dikatakan bahwa manajemen semakin menurunkan laba dengan melakukan tindakan manajemen laba dengan cara *decreasing income*. Jika DPR semakin tinggi maka semakin rendah keuntungan modal yang akan diterima oleh pemegang saham. Hasil penelitian tersebut mendukung teori keagenan sebagai teori utama yang mendasari penelitian ini. Teori keagenan (Jensen dan

Meckling, 1976) menjelaskan bahwa antara manajemen dan pemegang saham terbukti menimbulkan konflik karena kedua belah pihak, baik agen (manajemen) maupun *principal* (pemegang saham) menginginkan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hubungan kontraktual ini. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan yang dilakukan Kustono (2007) dan Sulistyawati (2013) yang menyatakan bahwa kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap perataan laba.

Adapun faktor lainnya yang berpengaruh terhadap manajemen laba yakni ukuran perusahaan. Selain deviden yang diterima, pemegang saham biasanya akan menilai investasi berdasarkan ukuran perusahaan yang akan diinvestasikan. Ukuran perusahaan adalah parameter yang menentukan suatu perusahaan termasuk ke dalam skala kecil, menengah, atau besar. Watt dan Zimmerman (1978) berpendapat dalam bukunya bahwa ukuran perusahaan dianggap sebagai proksi dari *political cost*, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manajemen laba. Perusahaan berukuran sedang dan besar memiliki tekanan yang lebih kuat dari stakeholders agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan investor, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini mendorong manajemen melakukan manajemen laba.

Ukuran perusahaan memberi alasan untuk melakukan tindakan *creative accounting* karena semakin besar suatu perusahaan maka aktivitas operasionalnya semakin kompleks, sehingga lebih memungkinkan manajer untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan besar melakukan lebih banyak kebijakan yang akan menyebabkan laba menurun dengan maksud mengurangi biaya politis. Besar

kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aktiva dan total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan tentu memiliki total aktiva yang besar, sehingga dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi serta semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari operasinya.

Dalam penelitiannya Siregar dan Utama (2005) dan Kusumawardhani (2012) dan mengatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Ini berarti semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan laba yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan kecil lebih cenderung melakukan pengelolaan laba dibandingkan perusahaan besar. Halim (2005) dan Llukani (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada pengelolaan laba, dimana perusahaan besar kegiatan operasional yang kompleks sehingga memungkinkan dilakukannya manajemen laba. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Penelitian Handayani dan Agustono (2009) menunjukkan perusahaan sedang dan besar tidak terbukti agresif dalam melakukan manajemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif, baik untuk menghindari *earning losses* dan *earning decreases*.

Adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen laba, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap tiga faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu beban pajak tangguhan, kebijakan deviden, dan ukuran perusahaan. Oleh sebab itu, penulis memilih judul “**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, KEBIJAKAN DEVIDEN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA.**”

B. Identifikasi Masalah

1. Manajemen laba sebagai suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan karena secara signifikan mempengaruhi laba perusahaan dan keputusan yang dibuat oleh *stakeholder*. Apalagi jika aktivitas rekayasa manajerial ini dilakukan untuk menyesatkan dan merugikan pihak lain
2. KPC melakukan rekayasa penjualan untuk penghematan pajak. Dimana perusahaan tersebut menunda pendapatannya agar laba yang dihasilkan kecil untuk meminimalkan pembayaran pajak. Rekayasa tersebut berhubungan dengan beban pajak tangguhan untuk penghematan pajak.
3. Kebijakan deviden sering menjadi sumber konflik antara manajer dan pemegang saham. Pemegang saham menginginkan deviden yang dibagikan tinggi sedangkan manajer lebih menyukai laba ditahan.
4. Ukuran perusahaan memberi alasan untuk melakukan tindakan manajemen laba karena semakin besar perusahaan aktivitas operasionalnya lebih kompleks.
5. Perusahaan besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang akan menyebabkan laba menurun dengan maksud mengurangi biaya politis.

C. Pembatasan Masalah

Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, namun peneliti akan membatasi penelitian hanya pada pengaruh beban pajak tangguhan, kebijakan deviden, dan ukuran perusahaan. Mengingat keterbatasan waktu peneliti hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2011-2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian berikutnya mengenai variabel beban pajak tangguhan, kebijakan deviden, dan ukuran perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen

laba. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk pengembangan ilmu dalam bidang ekonomi, bidang akuntansi, dan bidang manajemen mengenai pengaruh beban pajak tangguhan, kebijakan deviden, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen

Memberikan petunjuk bagi manajemen perlunya kemampuan manajemen menyusun laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Manajemen juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola perbedaan temporer sedemikian rupa sehingga laba akuntansi tetap dipersepsikan berkualitas dan direspon positif oleh investor atau *stakeholders*.

b. Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Sebagai informasi untuk membantu *user* agar dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya sehingga informasi yang didapat tidak menyesatkan.